BERLANGGANAN
SCAN BARCODE
Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Kedaulatan Rakyat
Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
http://www.krjogja.com

SUMBANGAN
DOMPET KR "COVID-19"
REKENING BCA
NO. : 126.556.5656
A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NB : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

MINGGU PAHING | 31 JANUARI 2021 (17 JUMADILAKIR 1954 / TAHUN LXXVI NO 126) | HARGA RP 4.000 / 12 HALAMAN

KR-Surya Adi Lesmana

Gunung Merapi tampak dari kawasan Kaliurang Barat Hargobinangun Sleman, Sabtu (30/1).

Gempa Permukaan Meningkat dalam Seminggu

Terjadi 71 Awan Panas dan 230 Lava Pijar

YOGYA (KR) - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan, dalam satu minggu ini (periode 22-28 Januari 2021) guguran lava pijar teramati sebanyak 230 kali dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter arah barat daya ke hulu Kali Krasak dan Kali Boyong.

Sedangkan awan panas guguran pada periode tersebut terjadi sebanyak 71 kali dengan jarak luncur maksimal 3.500 meter arah Kali Boyong dan terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimal 70 mm dan durasi 240 detik. Adapun tinggi asap maksimum 750 m teramati dari Pos Pengamatan Gunung Merapi Kaliurang pada 25 Januari 2021 pukul 05.30 WIB.

Kepala BPPTKG Dr Hanik Humaida dalam keterangannya mengatakan, intensitas guguran lava pijar dan awan panas guguran ini antara lain dipengaruhi posisi kubah lava yang tidak stabil karena berada di lereng sisi barat daya puncak Merapi atau di atas lava sisa erupsi tahun 1997. "Sehingga lava yang keluar tidak sempat lagi membentuk kubah, namun langsung mengalami guguran," ujarnya Sabtu (30/1).

Akibat banyaknya guguran lava pijar dan awan panas guguran tersebut, kata Hanik, volume kubah lava 2021 mengalami penurunan signifikan. Dia menjelaskan volume kubah lava 2021 yang sebelumnya mencapai 158.000 meter kubik pada 25 Januari 2021, menurun signifikan menjadi 62.000 meter kubik per 28 Januari 2021.

Seiring dengan penurunan volume kubah lava, potensi bahaya akibat erupsi Gunung Merapi diperkirakan ikut mengalami penurunan. "Yang perlu kita perhatikan kalau ada suplai magma dari dalam. Ini yang kita tidak pernah tahu. Namun sampai saat ini potensi itu menjadi lebih kecil," kata dia.

Dalam minggu ini kegempaan Gunung Merapi tercatat 6 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 105 kali gempa Fase Banyak (MP), 1.148 kali gempa Guguran (RF), 122 kali gempa Hembusan (DG) dan 1 kali gempa Tektonik (TT).

Untuk deformasi Gunung Merapi yang dipantau dengan menggunakan EDM pada minggu ini juga menurun dibanding minggu sebelumnya. Deformasi menunjukkan adanya laju pemendekan jarak sebesar 0,4 cm/hari.

"Secara umum kegempaan internal pada minggu ini lebih rendah dibandingkan minggu lalu, tapi gempa di permukaan seperti gempa guguran dan awan panas meningkat," pungkasnya.

(Dev)-f

SATPOL PP TEMUKAN 2.312 PELANGGARAN

Sanksi Sosial dan Sita KTP Diberlakukan

YOGYA (KR) - Edukasi dan pengawasan berkaitan dengan poin-poin yang ada dalam Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) terus dilakukan oleh Satpol PP DIY. Namun semua upaya tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam penerapan Prokes dan melaksanakan poin-poin dalam PTKM. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.

"Selama kebijakan PTKM diterapkan di DIY (sejak 11 Januari), kami sudah menemukan 2.312 pelanggaran. Dari jumlah tersebut sebanyak 61 di antaranya merupakan pelanggaran berkaitan dengan *Work from home* (WFH). Sedangkan untuk pelanggaran jam operasional sebanyak 844 pelanggaran. Penerapan 25 persen makan di rumah makan ada 421 pelanggaran dan pemakaian masker ada 981 pelanggaran," jelas Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, Sabtu (30/1).

Noviar mengungkapkan, sebelum adanya perpanjangan PTKM pihaknya lebih fokus ke protokol kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan masker dan kerumunan. Namun setelah dilakukan perpanjangan, beberapa hal lebih diintensifkan.

* Bersambung hal 10 kol 3

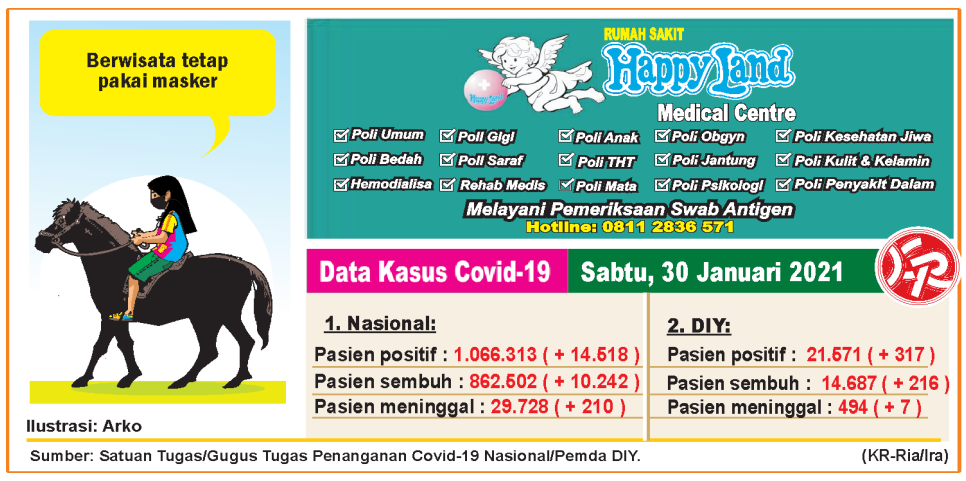

TIDAK DIALOKASIKAN DALAM APBN

Subsidi Upah Tahun 2021 Ditiadakan

MEDAN (KR) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " kata Ida, menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, di Medan, Sabtu (30/1).

Kemenaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) . Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.

KR-Istimewa

Ida Fauziyah

Kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi, "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.

Menaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga langkah pemerintah

* Bersambung hal 10 kol 3

JADWAL SALAT

Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
11:54	15:13	18:07	19:21	04:18

Minggu, 31 Januari 2021 — Sumber : Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'

Bersama Kita Melawan Virus Korona

Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972.**

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
	Melalui Transfer		
804	Henny Krissetiana	Perum Mranggen c-1a Jl.Magelang Yogya	500,000.00
	JUMLAH	**Rp**	**500,000.00**
	s/d 29 Januari 2021	Rp	421,525,000.00
	s/d 30 Januari 2021	**Rp**	**422,025,000.00**

(Empat ratus dua puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

(Siapa menyusul?)

PULSA, VOUCER DAN TOKEN LISTRIK

Tidak Ada Pungutan Pajak Baru

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.

"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu (30/1).

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Menkeu menjelaskan, ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum.

Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). "Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," tulis Sri Mulyani.

Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Sedang untuk voucer, PPN tidak dikenakan atas

* Bersambung hal 10 kol 1

KR-Istimewa

Sri Mulyani

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● **SAYA baru bertama ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, Minggu 10 Januari lalu. Melihat ada mobil berpatroli berputar-putar sambil mebunyikan sirine, cucu saya bertanya, ada apa. Saya jawab, "Mungkin Pak Jokowi akan datang." Ternyata, patroli itu mengusir kendaraan yang terlalu lama parkir di tempat terlarang. (Winaryo Amanu, Janturan UH 4/446A RT 17 RW 04 Yogyakarta 55164)-f**